

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI TONDANO DARI
PENCEMARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
MANADO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**



Diajukan Oleh:

Marcelino Andreas Rumangkang

NPM : 160512494

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI TONDANO DARI
PENCEMARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
MANADO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**



Diajukan Oleh:

Marcelino Andreas Rumangkang

NPM : 160512494

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 30 September 2020



Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI TONDANO DARI PENCEMARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 Oktober 2020
Tempat	: Aplikasi Zoom

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Sekretaris : Linda, S.H., M.KN

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“setiap manusia itu punya keistimewaan masing-masing, tetapi jika kamu menilai ikan dari cara dia memanjat pohon maka ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum atau skripsi ini saya persembahkan kepada:

“Tuhan Yesus Kristus”

“Orangtua dan Oma Opa dan keluarga besar yang sangat penulis cintai”

“Sahabat-sahabat tersayang”

“Teman-teman dekat”

“Almamater yang saya banggakan Universitas Atma Jaya Yogyakarta”

“Seluruh orang yang selalu mendoakan saya untuk sukses dalam segala hal”

“Dan demi kemajuan serta perlindungan Sungai Tondano”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Aspek Hukum Perlindungan Sungai Tondano Dari Pencemaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y.Sari Murti Widiyastuti,SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang tidak pernah lelah dan selalu sabar serta menyempatkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Seluruh dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan membantu kelancaran perkuliahan penulis dari awal memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini.

4. Ibu M. Lieke Kembuan, S.Sos. selaku Kepala Seksi Penanganan dan Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mando yang telah bersedia menyumbangkan waktu, tempat dan pikirannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yuyus Daud selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Tumintingyang telah meluangkan waktu, tempat dan pikirannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulisan skripsi ini.
6. Bapak Teddy Durian selaku Kepala Lingkungan Tiga Kelurahan Sindulang Satu yang telah meluangkan waktu, tempat dan pikirannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Herry Alfeds Ratu selaku Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado yang telah meluangkan waktu, tempat dan pikirannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua serta keluarga besarpenulis yang terkasih Mama, Papa, Kakak, dan juga kerabat penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan cintanya tiada henti, memberikan nasihat, dan tidak pernah lelah untuk selalu memberikan dukungan serta doa yang selalu mengalir untuk penulis. Terima kasih karena selalu ada hingga detik ini, penulis sangat bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan kepada penulis demi kelancaran skripsi ini, semoga lewat penulisan skripsi ini dapat menjadi salah satu kebanggaan dan wujud bakti penulis terhadap keluarga khususnya orang tua penulis.

9. Natasha Ngantung, Deska Dhia Rahayu, Muhammad Ilham T, Martin Boy Tafonao, Irene Yuniyanti Sada, Ni Komang Diah Valentina, Margareth, Tessa Bekasi, Philipus Raco, Marifatullah, Julius James, David CH dan Kawanannya Dobos Manado yang selalu mendukung walaupun terpisah jarak yang cukup jauh Manado-Yogyakarta dan sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang tiada henti-hentinya selalu memberikan dukungan, bantuan, saran, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu menghibur dan mendampingi penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
10. Kene Coffe House dan Cylo Esports yang memberikan dukungan agar penulis dapat fokus menyelesaikan skripsi dari pada Game.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis meng`harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkan.

Yogyakarta, 9 September 2020

Penulis,



Marcelino Andreas Rumangkang

ABSTRACT

This thesis research about Legal Aspects of Protection of the Tondano River from Pollution Based on Manado City Regional Regulation Number 7 of 2006 concerning Solid Waste Management and Cleaning Service Retribution. The problem in this thesis is Tondano River considered as one of the biggest river that have become life source for citizen in Manado. In fact, there are civilans who still do littering eventhough there are already rules applied for prohibition of littering. Furthermore, penalty have been settled for those who violate the regulations. This legal writing is using Empirical Law Research focused on the current social facts, interviews are held directly to interviewee in order to gain primary data as well as collecting secondary data consists of Primary Law and Secondary law. From the data analysis with inductive method, it can be concluded that government in terms of enforcing the law to protect Tondano River from defilement have partner with citizens living there by doing socialization, kubus apung, community service and inspection. However, there are obstacles on the implementation due to the lack of public awareness , limited facility of waste transportations fleets, temporary trash sorting that are no longer in use.

Keywords : legal protection, river pollution, river protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi.....	16
BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Sungai	17
B. Tinjauan Mengenai Pencemaran Lingkungan	19
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan	19

2. Jenis-jenis Pencemaran	20
C. Aspek Hukum Perlindungan Sungai Tondano	22
1. Gambaran Tentang Sungai Tondano	22
2. Pencemaran Sungai Tondano	24
3. Perlindungan Sungai Tondano	26
a. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.....	26
b. Perlindungan Hukum Sungai Tondano	29
c. Pelaksanaan Perlindungan Sungai Tondano.....	33
4. Kendala dan Solusi	35
a. Kendala	35
b. Solusi	36
BAB III. PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 September 2020

Yang menyatakan,



Marcelino Andreas Rumangkang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai merupakan salah satu sumber air bagi manusia. Banyak manusia yang memilih hidup dekat dengan sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Air digunakan untuk berbagai macam kegiatan dalam kesidupan sehari-hari, seperti keperluan rumah tangga, keperluan pertanian, keperluan industri, dan lainnya.¹ Sebagai salah satu sumber air bagi manusia, sungai sudah lama dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan hidup mulai dari keperluan rumah tangga, irigasi, perikanan dan pariwisata. Sumber air seperti sungai haruslah bersih agar dapat digunakan. Jumlah air yang cukup banyak tidak akan bisa dimanfaatkan dengan maksimal jika kualitas sumber airnya buruk.

Manusia dan alam sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana manusia merupakan bagian dari alam yang bertahan hidup dari sumber kekayaan yang ada di alam. Manusia dan komunitasnya di samping diberi hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.² Sebagian besar kerusakan

¹ Pitojo Tri Juwono, Aris Subagiyo, 2019, *Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dengan Wilayah Pesisir, Keberlanjutan Pengelolaan DAS Untuk Menjamin Kelangsungan Sumber Daya Pesisir*, UB Press, Malang, hlm 3.

² Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm 80.

lingkungan dilakukan oleh aktivitas manusia yang secara sadar atau tidak sadar membuang sampah sembarangan baik itu sampah rumah tangga atau sampah pabrik ke saluran irigasi ataupun langsung ke aliran sungai. Banyaknya sampah yang langsung dibuang ke aliran sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu inilah yang membuat air sungai tercemari. Itulah salah satu penyebab sungai-sungai di Indonesia tercemar dan sulit untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pencemaran sungai serta kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi sejak lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, contohnya kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau yang mengakibatkan sulit menemukan air. Hal ini menggambarkan semakin rusaknya lingkungan dan alam Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan bisa menyebabkan kerugian bagi manusia. Secara teoritis, kerugian dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kerugian yang dapat secara langsung dihitung dengan uang dan yang tidak dapat dihitung secara langsung dengan uang.³ Contoh kerugian yang dapat dihitung dengan uang antara lain adalah hilangnya penghasilan dan biaya pengobatan, sedangkan kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang antara lain adalah hilangnya kenikmatan hidup dan adanya penderitaan.⁴

³Andri G. Wibisana, 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm 7.

⁴ *Ibid.*

Sungai Tondano di Kota Manado merupakan salah satu sungai yang sering meluap ketika hujan. Sungai tondano meluap karena dipenuhi oleh banyaknya sampah yang dibuang ke sungai. Masyarakat Manado mempunyai kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga dapat menyebabkan berseraknya sampah, termasuk sampah di sungai. Dengan demikian sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan dampak negatif terhadap lingkungannya.⁵ Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Salah satu peraturan ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁶

Untuk mengatur pengelolaan sampah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, agar pembuangan sampah sembarangan dapat diatasi. Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Saat ini di Kota Manado terdapat Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Dalam Pasal 2 ayat (1) perda tersebut dikatakan “Dilarang membuang atau meletakkan dan/atau menyuruh orang membuang atau meletakkan sisa-sisa kotoran yang

⁵ Bokiraiya Latuamury, 2020, *Buku Ajar Manajemen DAS Pulau Pulau Kecil*, cetakan pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm 10.

⁶ Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasioanl*, edisi keempat, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 9.

diakibatkan oleh sisa-sisa: jualan, bahan dagangan, konsumsi rumah tangga, atau sampah lainnya yang dimaksud pada pasal 1 huruf f dan g pada tempat yang bukan peruntukannya ditempat-tempat umum, pusat perbelanjaan, pasar, terminal, pelabuhan, jalan umum, emperan atau selasar pertokoan, jalan, trotoar, parit, selokan, sungai kecuali pada tempat penampungan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah”.

Meskipun peraturan daerah tersebut telah mengatur dengan jelas larangan pembuangan sampah sembarangan, dalam kenyataannya masih belum bisa menanggulangi masalah sampah yang dapat menimbulkan pencemaran. Dalam penilaian Adipura 2018 yang baru lalu, Kota Manado masuk 10 (sepuluh) kota terkotor yang diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).⁷ Berdasarkan kategori Adipura tersebut, dapat dikatakan bahwa memang ada banyak persoalan lingkungan hidup di kota Manado, khususnya masalah sampah, sehingga masuk dalam daftar 10 (sepuluh) kota terkotor. Demikian juga mengenai sungai Tondano pun mengalami masalah, yakni banyaknya sampah yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian di Kota Manado bagi skripsi penulis dengan judul Aspek Hukum Perlindungan Sungai Tondano Dari Pencemaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

⁷ Kompas, 2019, *Manado Masuk 10 Kota Terkotor Menurut KLH*, <https://regional.kompas.com/read/2019/01/14/17583011/manado-masuk-10-kota-terkotor-menurut-klhk-ini-penjelasan-wakil-wali-kota>, diakses pada tanggal 15 September 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan sungai Tondano dari pencemaran sungai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi perlindungan sungai Tondano dari pencemaran sungai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan sungai Tondano dari pencemaran sungai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi perlindungan sungai Tondano dari pencemaran sungai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, terutama hasilnya, diharapkan dapat bermanfaat baik untuk teori maupun praktek.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan, yaitu bahwa hasilnya dapat menambah pengetahuan tentang sungai dan masalah pencemarannya akibat sampah. Demikian juga penelitian ini juga menambah kepustakaan tentang hukum lingkungan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai informasi tambahan di bidang hukum khususnya hukum Lingkungan Hidup bagi:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal perlindungan sungai Tondano dari pencemaran sungai agar kondisi serta kualitas sungai dapat membaik dan dapat digunakan lebih baik untuk kehidupan sehari-hari serta hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program dalam hal perlindungan sungai-sungai di Kota Manado.
- b. Bagi Pemerintah Kecamatan Tuminting terkait dengan pengelolaan sampah khususnya di daerah bantaran sungai Tondano di Kota Manado.
- c. Bagi Pemerintah Kota Manado penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam membuat produk hukum khususnya dalam pengaturan perlindungan sungai dari pencemaran yang saat ini diatur

oleh Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

- d. Bagi masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat lebih memberikan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan hidup agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan demi kelangsungan ekosistem yang ada di alam.
- e. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa untuk digunakan sebagai bahan referensi dalam pembuatan skripsi bagi mahasiswa program kekhususan Hukum Lingkungan Hidup.
- f. Bagi penulis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Demikian juga penelitian ini bermanfaat sebagai dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian-penelitian lain di kemudian hari di bidang lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI TONDANO DARI PENCEMARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN, merupakan karya asli penulis, bukan merupakan hasil karya plagiasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang mirip yaitu:

1. Suryono, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 130511132, Tahun 2018, menulis skripsi yang berjudul ASPEK HUKUM

PENCEGAHAN PENCEMARAN SUNGAI DARI KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
- b. Apa kendala dan solusi dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?

Dalam hasil penelitian penulis, usaha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang khususnya Bidang Sumber Daya Air, yaitu dalam mengatasi pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu, melakukan pengujian kualitas air sungai yang dilakukan persemester atau 6 (enam) bulan sekali di wilayah Kotawaringin Barat. Kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Khususnya Bidang Sumber Air dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Khususnya Bidang Sumber Air memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah ke perairan atau sekolah, tidak membuang sisa pestisida ke perairan, menggunakan sabun dan

detergen yang dapat terurai di lingkungan, secara rutin membersihkan perairan.

2. Jessica Kirana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 150512050, Tahun 2018, menulis skripsi yang berjudul ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI CILIWUNG DARI PENCEMARAN AKIBAT PEMUKIMAN LIAR.

Rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat pemukiman liar?
- b. Apa saja kendala dan solusi bagi perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat pemukiman liar?

Dalam hasil penelitian penulis, Aspek hukum perlindungan sungai ciliwung dari pencemaran akibat pemukiman liar seperti pencegahan, penanggulangan, pemulihan sudah di jalankan walaupun dalam hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap sungai ciliwung belum berjalan secara efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat untuk memberhasikan program yang dilakukan oleh Pemerintah atau Dinas terkait hasil yang didapatkan pun kurang maksimal.

Kepadatan penduduk di DKI Jakarta pun menyebabkan Pemerintah atau Dinas yang terkait sulit untuk menertibkan pemukiman liar karena dalam hal ini kekurangan lahan untuk pembuatan rumah susun bagi masyarakat pun menjadi hal kompleks karena penertiban tidak semata-mata langsung begitu

saja dilakukan tetapi harus diberikan penggantian tempat tinggal terlebih dahulu seperti rusun setelah adanya rusun baru dapat ditertibkan.

3. Tedy Verdyanto Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 100510347, tahun 2017, menulis skripsi yang berjudul PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?
- b. Apa kendala yang dihadapi Badan Lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

Dalam hasil penelitian penulis, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian sungai Bengawan Solo dengan Baik meskipun belum maksimal. Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan promosikan gerakan penyelamatan sungai bengawan solo. Hanya saja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu langsung ke sungai. Belum maksimalnya Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai bengawan solo disebabkan oleh kendala sebagai berikut: terlalu luasnya Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo,

sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dan Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut masing-masing lebih menekankan pada pencegahan pencemaran, perlindungan sungai dari kegiatan masyarakat serta peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran sungai. Hal ini jelas berbeda dengan skripsi yang penulis tulis karena lebih menekankan pada perlindungan sungai berdasarkan perda, sehingga terdapat perbedaan yang cukup jauh dengan ketiga skripsi diatas.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Aspek hukum dalam penelitian ini adalah tinjauan mengenai perlindungan sungai Tondano dari pencemaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan juga peraturan lain yang terkait dengan perlindungan sungai Tondano.

2. Perlindungan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan adalah penjagaan memberi pertolongan.⁸ Perlindungan dalam penelitian ini adalah upaya atau tindakan hukum yang diberikan dalam melindungi sungai Tondano dari pencemaran yang dilakukan oleh aktivitas manusia baik yang disengaja atau tidak, agar kualitas sungai menjadi lebih baik.

⁸ Suharso, Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya, Semarang, hlm 295.

3. Sungai

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan. Sungai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sungai Tondano yang merupakan salah satu sungai besar yang berada di Kota Manado Sulawesi Utara, yang berhulu di kabupaten Minahasa dan bermuara di Kota Manado.

4. Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan berfokus pada fakta sosial yang ada. Penelitian tentang Aspek Hukum Perlindungan Sungai Tondano Dari Pencemaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 tahun 2006 dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer dan juga dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara langsung terkait tentang obyek serta permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
- e) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- f) Perda kota Manado Nomor 1 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034.

2) Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Pendapat hukum maupun bukan pendapat hukum diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- b) Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang

berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Wawancara adalah teknik yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data dari narasumber. Persiapan dalam wawancara diperlukan yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Dalam wawancara juga menggunakan alat perekam suara dari *handphone* agar informasi dan data yang disampaikan oleh narasumber yang berkaitan dengan obyek dan permasalahan penelitian dapat diperoleh dengan akurat. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dianggap mengetahui banyak terkait dengan Aspek Hukum Perlindungan Sungai Tondano Dari Pencemaran Berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- b. Studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan mendapat data sekunder. Data yang diperoleh berasal dari dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal, hasil penelitian, buku, artikel, internet dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan daerah bantaran sungai Tondano yang berada di kelurahan Sindulang Satu, kecamatan Tuminting, Kota Manado. Lokasi penelitian ini juga merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah kepadatan penduduk terbanyak di kecamatan Tuminting.

5. Responden

- 1) Bapak Teddy Durian selaku Kepala Lingkungan Tiga yang berada di kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.
- 2) Ibu M. Lieke Kembuan, selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
- 3) Bapak Yuyus Daud S.Sos. Selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Tuminting.
- 4) Pak Herry Alfeds Ratu, selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data dianalisis secara kualitatif. Yang penulis maksud dengan analisis kualitatif ialah analisis dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian sesuai data yang diperoleh. Kemudian kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu kesimpulan khusus tentang sungai Tondano berdasarkan hal-hal umum baik dari teori maupun dari peraturan.

H. Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi

Sistematika penulisan hukum atau skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum atau skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, konsep atau variabel kedua, dan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan yaitu perlindungan hukum Sungai Tondano dari pencemaran secara jelas terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang pada intinya mengatakan bahwa setiap orang dilarang membuang atau meletakkan dan/atau menyuruh orang membuang atau meletakkan sisa-sisa kotoran yang diakibatkan oleh sisa-sisa: jualan, bahan dagangan, konsumsi rumah tangga, atau sampah lainnya yang dilarang dalam pasal ini khususnya sungai. Pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan warga masyarakat setempat yang tinggal di bantaran sungai yaitu dengan melakukan sosialisai, pengadaan kubus apung, kerja bakti, dan sidak.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan sungai Tondano berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat, tempat pembuangan akhir yang sudah penuh, keterbatasan armada pengangkut sampah, dan tempat pemilahan sampah sementara yang tidak lagi digunakan. Adapun solusi terhadap kendala yang dihadapi diatas sebagai berikut yaitu, pemasangan CCTV dibantarn sungai Tondano, pemberlakuan kembali tempat pemilahan sampah sementara, penambahan armada pengangkut sampah dan pembentukan pasukan khusus membersihkan sungai.

B. SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tentang aspek hukum perlindungan sungai Tondano dari pencemaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah daerah kota Manado membuat peraturan daerah tentang persampahan yang baru, karena menurut pendapat saya peraturan daerah nomor 7 tahun 2006 sebagian sudah tidak diberlakukan dan sanksi yang terdapat dalam perda tersebut tidak cukup untuk membuat efek jera terhadap pelanggar.
2. Sebaiknya pemerintah menambahkan Sanksi sosial melalui media massa terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Sanksi sosial melalui media massa dirasa akan lebih membuat pelaku merasakan efek jera karena akan menimbulkan rasa malu karena telah membuang sampah sembarangan, dan di harapkan kedepannya pelaku tidak akan melakukan pelanggaran tersebut kembali.
3. Sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan agar masyarakat lebih meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan memahami bahwa membuang sampah ke sungai adalah tindakan melawan hukum dan dapat di jatuhi hukuman pidana.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Muhammadiyah University Pres, Surakarta.
- Andri G. Wibisana, 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Bokiraiya Latuamury, 2020, *Buku Ajar Manajemen DAS Pulau Pulau Kecil*, cetakan pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Jakarta.
- Marhaeni Ria Siombo, 2013, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mohammad Fadli, Mukhilsh, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang.
- Pitojo Tri Juwono, Aris Subagiyo, 2019, *Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dengan Wilayah Pesisir, Keberlanjutan Pengelolaan DAS Untuk Menjamin Kelangsungan Sumber Daya Pesisir*, UB Perss, Malang.

Sari Marlina, 2017, Aspek aspek Hukum Lingkungan 1, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo Jawa Timur.

Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasioanl*, edisi keempat, Airlangga University Press, Surabaya

Suharso, Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86.

Peraturan Daerah Nomor Kota Manado Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2006 Nomor 56.

Peraturan Daerah kota Manado Nomor 1 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034. Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2014 Nomor 1.

Jurnal :

Loisa Novany, Veronica Kumurur, Ingerid Moniag, 2014, *Analisis Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado*,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA/article/view/6057>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.

Sharon Marthina Esther Rapar, Tiny Mananoma dkk, 2014, *Analisis Debit Banjir Sungai Tondano Menggunakan Metode Hss Gama I Dan Hss Limantara*,
<https://www.neliti.com/id/publications/140443/analisis-debit-banjir-sungai-tondano-menggunakan-metode-hss-gama-i-dan-hss-liman>, diakses tanggal 15 Oktober 2019

Tommy Tiny Mananoma, Lambertus Tanudjaja, 2015, *Analisis Debit Banjir Di Sungai Tondano Berdasarkan Simulasi Curah Hujan Rencana*,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/tekno/article/viewFile/8799/8360>,
 diakses tanggal 15 Oktober 2019.

Website :

<https://www.neliti.com/id/publications/140443/analisis-debit-banjir-sungai-tondano-menggunakan-metode-hss-gama-i-dan-hss-liman>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.

<https://www.cekkembali.com/pencemaran-lingkungan/>. Diakses 8 Oktober 2019.

Kompas, 2019, *Manado Masuk 10 Kota Terkotor Menurut KLH*,
<https://regional.kompas.com/read/2019/01/14/17583011/manado-masuk-10-kota-terkotor-menurut-klhk-ini-penjelasan-wakil-wali-kota>, diakses pada tanggal 15 September 2019.

Lingkunganhidup.co, 2017, *Pengertian Pencemaran Tanah, Penyebab, Akibat dan Solusi*,
<https://lingkunganhidup.co/pengertian-pencemaran-tanah-penyebab-akibat-solusi/>, diakses tanggal 15 Oktober 2019, pukul 20:00 WIB.

Saiful W. Harahap, 2014, *Banjir Bandang Manado Karena Kerusakan DAS Tondano*,
<https://www.kompasiana.com/infokespro/552ae5506ea8349c2a552d50/banjir-bandang-manado-karena-kerusakan-das-tondano>, diakses tanggal 20 Februari 2020.